



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RINEL PONTO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **279973**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

602.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.950 m2/121 m2 di KAB / KOTA
BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. Tanah Seluas 9.972 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 10.699 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 42.000.000
5. Tanah Seluas 8.217 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

24.500.000

1. MOTOR, Yamaha Yamaha 54P (MIO J) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, Yamaha F1ZR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000



3. MOTOR, YAMAHA F1 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. LAINNYA, HONDA GX120 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.719.798
F. HARTA LAINNYA	Rp.	4.159.231
Sub Total	Rp.	680.379.029
III. HUTANG	Rp.	246.767.717
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	433.611.312

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.